

Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Identifikasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Barat

Jonis Arian David¹, Linda Sari², Suripto³

**¹Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat, ²Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung, ³Universitas Lampung**

Email: jadavid750@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pejabat Badan Pendapatan Daerah serta wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu pendataan ulang wajib pajak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin, penyelenggaraan sistem komputerisasi penerimaan daerah, serta peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Keempat strategi tersebut terbukti efektif dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan pajak daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kompetensi aparatur pajak, kurang optimalnya monitoring, belum terintegrasinya sistem pemungutan pajak secara daring, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem informasi perpajakan berbasis digital, serta memperluas edukasi perpajakan bagi masyarakat guna memperkuat efektivitas kebijakan peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Barat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah.

ABSTRACT

Increasing Regional Original Revenue (PAD) is one of the main indicators of regional fiscal independence in supporting sustainable development. This research aims to analyze strategies for increasing regional revenue by identifying local tax potential in West Lampung Regency and identifying the inhibiting factors that affect its implementation. This research uses a qualitative approach with a descriptive method thru data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation of Regional Revenue Agency officials and taxpayers. The research results indicate that the strategy for increasing local revenue is implemented thru four main steps: re-registering taxpayers, conducting regular monitoring and evaluation, implementing a computerized local revenue system, and increasing the commitment of all stakeholders. These four strategies have proven effective in strengthening the transparency, efficiency, and accuracy of local tax management. However, its implementation still faces several obstacles, such as low tax official competency, suboptimal monitoring, the lack of integration of the online tax collection system, and low taxpayer awareness and compliance. Therefore, the local government needs to increase human resource capacity, strengthen the digital-based taxation information system, and expand tax education

for the public in order to strengthen the effectiveness of policies to increase local revenue in West Lampung Regency.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Tax.

Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian fiskal daerah (Maulidya et al., 2022). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi keuangan sendiri guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Shaturaev, 2021). Salah satu sumber utama penerimaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah dalam meningkatkan PAD menjadi hal penting agar pembangunan tidak semata bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Sari, 2020).

Pajak daerah memiliki peran signifikan sebagai komponen utama PAD, yang diharapkan mampu menjadi instrumen ekonomi sekaligus sumber pembiayaan Pembangunan (Zhang et al., 2022). Namun, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Lampung Barat, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pendataan wajib pajak, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini menghambat pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak secara maksimal dan berdampak pada rendahnya kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, diperlukan strategi peningkatan pendapatan daerah yang berbasis pada identifikasi potensi pajak daerah secara komprehensif (Kurniawan et al., 2024). Identifikasi ini mencakup proses pendataan ulang wajib pajak, penguatan sistem monitoring, peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak, serta penerapan sistem komputerisasi dan digitalisasi data pajak (Rulandari et al., 2022). Upaya strategis ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian fiskal pemerintah (Rezeki & Harahap, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah serta mengungkap faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka **Strategi**

Strategi merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien (Lari et al., 2020). (Jacobsen & Johnsen, 2020) menyebut strategi sebagai pola terpadu antara tujuan, kebijakan, dan langkah operasional yang membentuk kesatuan kohesif. Sedangkan (Chtioui, 2019) menekankan

strategi sebagai proses penentuan arah jangka panjang organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi dibutuhkan untuk mengatur kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal (Alford & Greve, 2017).

Penerapan strategi dalam peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui identifikasi potensi pajak, pendataan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan komitmen aparatur (Li et al., 2020). Menurut Simanjuntak (2021), langkah-langkah strategis yang penting meliputi pendataan ulang wajib pajak, monitoring dan evaluasi rutin, sistem komputerisasi penerimaan daerah, serta kerja sama lintas sektor. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak daerah (Rani et al., 2025).

Peningkatan

Peningkatan diartikan sebagai proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. (Henderson & Loreau, 2023) menjelaskan bahwa peningkatan merupakan tahapan kemajuan dari tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan (Fukase & Martin, 2020) menyatakan peningkatan sebagai usaha menaikkan mutu dan produktivitas melalui berbagai inovasi. Dalam konteks administrasi publik, peningkatan mencakup upaya memperbaiki kinerja, kualitas pelayanan, serta efektivitas program Pembangunan (Jansky & Palanský, 2019).

Dalam hal pendapatan daerah, peningkatan mengarah pada langkah-langkah strategis untuk memperbesar kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang sah. Hal ini menuntut perbaikan sistem keuangan, peningkatan profesionalisme aparatur, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah merupakan proses berkelanjutan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat (Liswatin, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. (Hubalillah et al., 2022) menyebut PAD sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

(Oktaviannur et al., 2022) menambahkan bahwa peningkatan PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat dan efektivitas pengelolaan pajak serta retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dalam pemungutan pajak, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Penguatan PAD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkelanjutan.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Matasik & Adi, 2023). (Widuri et al., 2019) mendefinisikan pajak sebagai

pungutan wajib yang dikenakan kepada masyarakat tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

(Karim et al., 2023) menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, seperti pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, dan BPHTB. Optimalisasi pajak daerah dapat dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak, penerapan sistem digital dalam administrasi pajak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

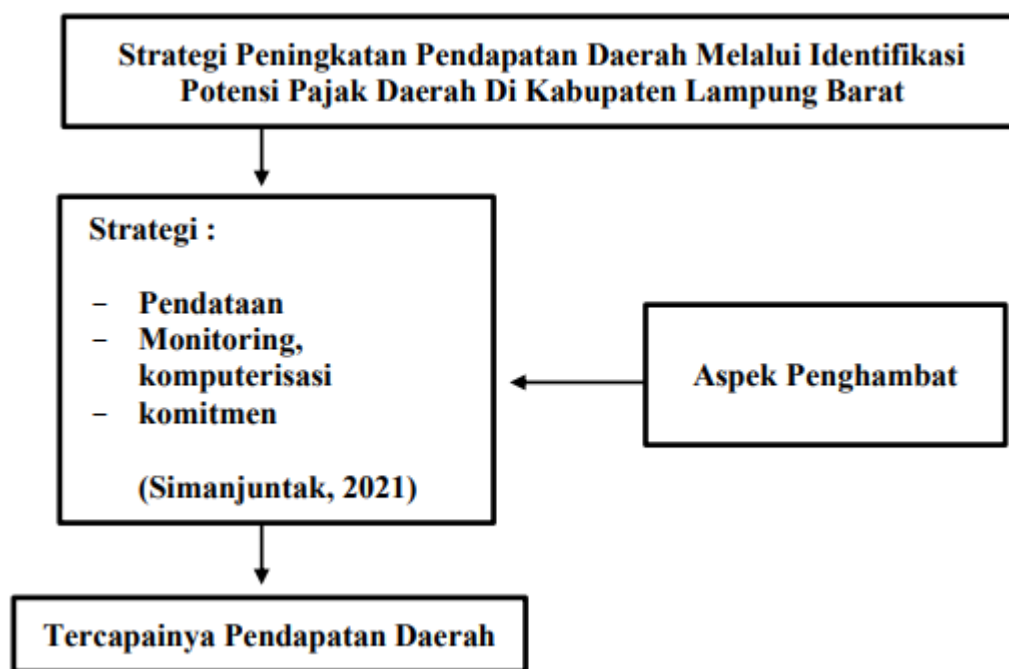
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual berdasarkan fakta di lapangan. Proses penelitian dilakukan secara ilmiah dengan langkah-langkah rasional, empiris, dan sistematis, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Firman, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata terkait mekanisme dan strategi peningkatan pendapatan pajak daerah. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap informan kunci, antara lain pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat serta wajib pajak yang relevan, guna mendapatkan perspektif mendalam mengenai kebijakan dan pelaksanaan strategi pajak daerah. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder berupa laporan resmi, peraturan daerah, serta dokumen administratif yang mendukung keabsahan hasil penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling* agar memperoleh sumber informasi yang paling memahami permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data untuk memastikan validitas temuan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data disusun secara naratif agar memudahkan interpretasi. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan pola, makna, dan keterkaitan antar data yang muncul, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hasil dan Pembahasan

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Identifikasi Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Lampung Barat

Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Lampung Barat. Pajak daerah menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, potensi pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, terutama dari sektor-sektor utama seperti perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Pajak bumi dan bangunan tercatat sebagai penyumbang tertinggi terhadap pendapatan daerah, diikuti oleh pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, dan hiburan.

Meskipun capaian realisasi pajak tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik (lebih dari 99% dari target), pengelolaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya sistem database perpajakan yang terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia, pengenaan tarif pajak di bawah batas maksimal, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga belum sepenuhnya menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagaimana disarankan, termasuk modernisasi sistem komputerisasi, monitoring berkala, dan peningkatan komitmen lintas sektor.

Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak memerlukan langkah-langkah strategis seperti pemetaan potensi pajak secara akurat, penguatan kapasitas aparatur pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMN. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Barat secara berkelanjutan.

Menurut Simanjuntak (2021), strategi peningkatan pendapatan daerah meliputi empat faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu pendataan, monitoring, penyelenggaraan sistem komputerisasi, dan peningkatan komitmen.

1. Pendataan dilakukan melalui verifikasi ulang wajib pajak, kerja sama dengan pihak ketiga, pembenahan manajemen, serta pemberian sanksi bagi pelanggar. Pendataan yang akurat bertujuan memperbarui potensi pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Monitoring dilakukan secara rutin melalui audit internal, pelatihan aparatur pajak, penggunaan teknologi, dan evaluasi kinerja guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Monitoring ini mendukung efektivitas sistem *self assessment* dan menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
3. Sistem Komputerisasi pajak menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi pajak. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penagihan pajak dapat dilakukan secara elektronik dan real-time.
4. Peningkatan Komitmen melibatkan reformasi pajak dan penguatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, penyederhanaan administrasi, serta sinergi antar lembaga. Pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Barat menekankan pentingnya integrasi antara pendataan ulang wajib pajak, monitoring berkala, penerapan sistem komputerisasi, dan peningkatan komitmen seluruh stakeholder. Langkah-langkah tersebut berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Aspek-Aspek Penghambat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Identifikasi Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Lampung Barat

Hambatan merupakan faktor atau kondisi yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya suatu sasaran, serta menjadi kekuatan yang dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan pekerjaan, hambatan memiliki peran yang signifikan karena dapat mengganggu kelancaran proses dan mengurangi efektivitas pencapaian tujuan. Hambatan dapat bersumber dari faktor internal, seperti kurangnya komitmen dan kemampuan individu, maupun dari faktor eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, regulasi, dan dukungan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan, hambatan cenderung bersifat negatif karena memperlambat laju pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam implementasi kebijakan Bupati Kabupaten Lampung Barat mengenai *Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Identifikasi Potensi Pajak Daerah*, ditemukan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar karena adanya beberapa kendala di lapangan. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat menyatakan bahwa salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, yang terlihat dari masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung peningkatan pendapatan daerah, seperti potensi pajak dan retribusi di berbagai sektor, tren pertumbuhan PAD yang meningkat pada tahun 2022–2023, keberadaan regulasi dan tarif PAD, ketersediaan anggaran pemungutan, serta dukungan sistem pemungutan pajak secara daring melalui alat

taping system. Namun demikian, hambatan yang masih dihadapi antara lain adanya tarif pajak daerah yang sudah tidak relevan serta aset pemerintah daerah yang belum dioptimalkan sebagai sumber *passive income*.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan cukup efektif dan efisien. Strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan di berbagai aspek pelaksanaannya. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa strategi peningkatan pendapatan daerah mencakup empat aspek utama. **Pertama**, pendataan, yang meliputi kegiatan pembaruan data wajib pajak untuk memastikan potensi pajak daerah teridentifikasi secara menyeluruh. Namun, hambatan yang dihadapi adalah rendahnya kompetensi petugas pemungut dalam melakukan pendataan ulang dan belum optimalnya pencatatan potensi pajak pada sektor-sektor seperti rumah makan, reklame, parkir, BPHTB, PPJ, serta mineral bukan logam dan batuan. **Kedua**, monitoring, yang berperan penting dalam menjamin kepatuhan dan transparansi pengelolaan pajak. Hambatan yang muncul berupa kurangnya kegiatan monitoring rutin dan evaluasi akibat keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya transparansi dalam penggunaan dana pajak. **Ketiga**, penyelenggaraan sistem komputerisasi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, masih menghadapi kendala berupa sistem pemungutan pajak yang belum sepenuhnya berbasis daring serta data penerimaan pajak yang belum akurat. **Keempat**, peningkatan komitmen, baik dari aparaturnya pemungut pajak maupun masyarakat wajib pajak, masih menjadi tantangan utama. Rendahnya kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, serta persepsi negatif terhadap transparansi penggunaan pajak, menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan strategi ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat berbagai kendala, strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak di Kabupaten Lampung Barat telah memberikan hasil yang cukup positif. Untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi pajak berbasis digital, serta peningkatan transparansi dan edukasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat meliputi beberapa langkah utama, yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah; menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN dalam pengelolaan serta pemungutan pajak daerah; melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin; menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah; serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud secara optimal. Selain itu, pembentukan tim PAD lintas sektoral menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas

pelaksanaan kebijakan. Keempat strategi tersebut merupakan faktor kunci yang mendesak untuk segera diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

2. Aspek-aspek penghambat dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Barat antara lain rendahnya kompetensi petugas pemungut pajak dalam melakukan pendataan ulang wajib pajak, kurang optimalnya kegiatan monitoring terhadap alokasi dan penggunaan pajak yang belum transparan, serta masih adanya indikasi penyelewengan pajak. Selain itu, sistem pemungutan PAD belum sepenuhnya berbasis daring (online), data dan perencanaan penerimaan pajak daerah belum akurat, komitmen sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak masih rendah, serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut masih perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Alford, J., & Greve, C. (2017). Strategy in the public and private sectors: Similarities, differences and changes. *Administrative Sciences*, 7(4), 1–17. <https://doi.org/10.3390/admsci7040035>
- Chtioui, S. (2019). The Objectives and Basis of Public Administration Reform (PAR) Strategy. *Journal of US-China Public Administration*, 16(2), 67–76. <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2019.02.004>
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Fukase, E., & Martin, W. (2020). Economic growth, convergence, and world food demand and supply. *World Development*, 132, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104954>
- Henderson, K., & Loreau, M. (2023). A model of Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities in promoting human well-being and environmental sustainability. *Ecological Modelling*, 475, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110164>
- Hubalillah, H., Badaruddin, B., & Kusmanto, H. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Bus Samsat Keliling Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Medan Selatan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 11(1), 372–384. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5662>
- Jacobsen, D. I., & Johnsen, Å. (2020). Alignment of strategy and structure in local government. *Public Money and Management*, 40(4), 276–284. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1715093>
- Jansky, P., & Palanský, M. (2019). Estimating the scale of profit shifting and tax revenue losses related to foreign direct investment. *International Tax and Public Finance*, 26(5), 1048–1103. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09547-8>
- Karim, A. R., Aneta, Y., & Tui, F. P. (2023). Enhancing Billboard Tax Implementation For Maximum Revenue Streams. *Public Policy Journal*, 4(2), 98–107. <https://doi.org/10.37905/ppj.v4i2.2115>

- Kurniawan, A., Akbar, B., & Sinurat, M. (2024). Regional Tax Management Optimization Model to Realize Regional Financial Independence in Pekanbaru City, Riau Province. *International Journal Publishing INFLUENCE: International Journal of Science Review*, 6(1), 18–32. <https://influence-journal.com/index.php/influence/index>
- Lari, M. A. D. A., Hamid, N. A., & Lari, D. A. D. A. (2020). Development of structural mediation model of innovative strategy, employees' job performance and technology for uae government sector. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 11(2), 188–195. <https://doi.org/10.30880/ijscet.2020.11.02.023>
- Li, L., Gao, S., Yang, W., & Xiong, X. (2020). Ship's response strategy to emission control areas: From the perspective of sailing pattern optimization and evasion strategy selection. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 133, 101835. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.101835>
- Liswatin, L. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe. *Sibatik Journal*, 1(3), 83–96.
- Matasik, R., & Adi, P. H. (2023). The Role of the Inspectorate in Supervising Surface Water Tax: Case Study of the Inspectorate of West Papua Province. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 255–267. <http://ijsoc.goacademica.com>
- Maulidya, F., Yuliansyah, R., & Siladjaja, M. (2022). The effect of regional wealth, regional dependence level, and regional financial independence on fiscal performance Subjects Accounting and Auditing Reviewing Editor. *Journal of Public Auditing and Financial Management | EISSN*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v2i1.1589>
- Oktaviannur, Moh., Fajri, R. C., & Farrel, A. (2022). Analisis Pengaruh Budaya Kerja Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Povinsi Lampung. *Jurnal AKTUAL*, 20(2). <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i2.273>
- Rani, Y. V., sayrani, L. P., & Putu Pradana, I. Y. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngada (Studi Pada Sektor Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 339–370. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>
- Rezeki, S., & Harahap, R. D. (2022). Implementation of Restaurant Tax Management Policy at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Medan City. *Journal of Indonesian Management*, 2(2), 315–318.
- Rulandari, N., Natision, A., Kommer, V. Van, Kesmawan, A. P., & Suryanah, S. (2022). Analysis of the Effectiveness of Taxpayer Data Security in Implementing Tax Obligations at the Directorate General of Taxes. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 241–254. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.15976>
- Sari, M. (2020). Analysis of General Allocation Fund Efficiency and Regional Original Income on The Financial Performance of City Governments in Province Aceh. *Jurnal Of*

Malikussaleh Public Unimal, 3(1), 27–36.
http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_public

Shaturaev, J. (2021). 2045: Path to nation's golden age (Indonesia Policies and Management of Education). *"Science and Education" Scientific Journal*, 2(12), 866–875.
<https://orcid.org/0000-0003-3859-2526>

Widuri, R., Marta, F., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, the Trust on Authorities, and the Tax Audit Toward Tax Compliance. *The Asian Institute of Research Journal of Economics and Business*, 2(2), 218–229. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.02.81>

Zhang, J., Han, S., & Shan, J. (2022). An Empirical Analysis of the Impact of Environmental Protection Tax on Corporate Earnings Management. *Mobile Information Systems*, 1–12.
<https://doi.org/10.1155/2022/5298873>